

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang di ukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkepita (PDRB Per Kapita). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno,2019:10).

Definisi pertumbuhan ekonomi yang lainnya adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di definisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa (Rapana&sukarno, 2017:7).

Pertumbuhan ekonomi ialah bentuk peningkatan output total pada periode waktu tertentu tujuannya agar menurunnya angka kemiskinan dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan. Output total adalah pendapatan dari hasil per kapita dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Indikator utama dalam memperkirakan besarnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara maupun daerah ialah produk domestik bruto. Sedangkan PDRB merupakan suatu nilai

barang dan jasa yang secara keseluruhan dapat diperoleh atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dalam suatu perekonomian. (BPS RI, 2020).

2.1.1.3 Teori model Solow-Swan

Model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan (the Solow-Swan growth model) pertumbuhan ekonomi terdapat tiga prediksi penting, pertama peningkatan modal per tenaga kerja menciptakan pertumbuhan ekonomi selama masyarakat dapat terus memberikan modal secara produktif. Kedua, negara terbelakang dengan tingkat modal per kapita yang rendah akan tumbuh lebih cepat karena setiap investasi dari modal akan menghasilkan imbal hasil yang lebih besar. ketiga, dikarenakan adanya diminishing returns terhadap modal, tingkat ekonomi akan mencapai suatu keadaan di mana peningkatan modal baru tidak akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Badan Pusat Statistika mengartikan bahwa PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa atau nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah .Sedangkan Nanga (2005) menyatakan bahwa PDRB adalah total nilai atau harga pasar (market place) dari seluruh barang dan jasa akhir(final goods and service) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. kemudian, Sukirno (2006) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpamemandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil yang pengukurannya tidak hanya berdasarkan jumlah PDRB secara keseluruhan, namun juga memperlihatkan distribusi pendapatan menyebar yang telah menyebar ke

seluruh lapisan dalam masyarakat. Tinggi rendahnya angka PDRB suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam mengelola sumberdaya daerahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Permata (2012) yang menyatakan bahwa besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. dalam menghitung PDRB suatu daerah dapat menggunakan tiga pendekatan, antara lain:

- a) Pendekatan produksi.
- b) Pendekatan Pengeluaran.
- c) Pendekatan pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumber daya yang terbatas sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang. PDRB Per Kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB PerKapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Per Kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah (Mahdalena et al., 2015). PDRB Per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi

kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah (Todaro, 2006).

BPS (2012), menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB Per Kapita. PDRB dapat menjadi salah satu ukuran untuk menilai kondisi perekonomian di suatu wilayah. PDRB diperoleh melalui perhitungan total nilai produk dan layanan yang diproduksi oleh pelaku ekonomi di suatu wilayah (Sasana dalam Syahrullah, 2014). PDRB terbagi 2 yaitu atas dasar harga berlaku yang dihitung berdasarkan harga tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga yang berlaku tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga berlaku merupakan dasar untuk mengukur kemampuan kapasitas ekonomi suatu wilayah. Sedangkan PDRB harga konstan digunakan sebagai dasar untuk menilai pertumbuhan ekonomi per tahun tanpa terpengaruh pada faktor harga.

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan berakibat terjadi ketimpangan pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*). Selanjutnya, tercipta kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2003). Menurut Kuncoro, pendekatan pembangunan tradisional dipahami sebagai pembangunan yang fokus terhadap peningkatan PDRB provinsi kabupaten, atau kota. Selanjutnya, pembangunan ekonomi tidak

hanya diukur atas pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tapi harus diperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan yang sudah menyebar di masyarakat dan siapa yang telah menikmati hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdasar pada kualitas serta konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa mengubah pola makanan pokoknya ke barang murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu (N.Gregory Mankiw,2000;16). Produk Domestik Regional Bruto menurut BPS, merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan, faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi(lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas

dasar “harga konstan”. PDRB dapat menjadi salah satu ukuran untuk menilai kondisi perekonomian di suatu wilayah.

PDRB diperoleh melalui perhitungan total nilai produk dan layanan yang diproduksi oleh pelaku ekonomi di suatu wilayah (Sasana dalam Syahrullah, 2014). PDRB terbagi 2 yaitu atas dasar harga berlaku yang dihitung berdasarkan harga tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga yang berlaku tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga berlaku merupakan dasar untuk mengukur kemampuan kapasitas ekonomi suatu wilayah. Sedangkan PDRB harga konstan digunakan sebagai dasar untuk menilai pertumbuhan ekonomi per tahun tanpa terpengaruh pada faktor harga.

2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (Sinarni, 2017:17). Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

2.1.2.1 Komponen- Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup identik dengan aspek kesehatan yang merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kemampuan penduduk dalam hal seberapa lama harapan hidup dapat mencapai yang mengisyaratkan tingkat kesehatan. Angka harapan hidup juga sangat dipengaruhi oleh banyak kematian bayi dan balita yang memang masih sangat rentan hidupnya serta kematian ibu saat melahirkan. Kematian dapat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan penduduk yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, dan kebersihan lingkungan. Angka kematian bayi dan balita terjadi selain disebabkan oleh kurangnya asupan gizi juga disebabkan oleh keadaan lingkungan disekitar, seperti: sumber air bersih, fasilitas buang air besar serta jarak pembuangan tinja dari saluran air.

2. Angka Melek Huruf (AMH)

Rata-rata Lama Sekolah Tingkat melek huruf/buta huruf dan angka partisipasi sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk, selain seberapa lamanya waktu sekolah yang ditempuh.

Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas yang berdasarkan pendidikannya, mewujudkan program wajib sembilan tahun, selain itu peningkatan program-program bagi mereka yang belum memiliki ijazah dengan mengupayakan program kejar paket dan sebagainya. Walaupun masih merupakan sebuah tantangan bagi dunia pendidikan khususnya pemerintah dan dinas terkait agar lebih meningkat kualitas pengetahuan penduduknya baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun informal diluar sekolah seperti menggalakkan

program-program Kejar Paket atau memperbanyak sekolah-sekolah terbuka di wilayah yang sulit dijangkau.

3. Daya Beli

Untuk menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Dalam mengukur tingkat perekonomian daerah dapat digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan suatu proses kegiatan perekonomian di suatu wilayah yang dihitung dari seluruh pencapaian transaksi yang dilakukan oleh penduduk dari berbagai sektor, sehingga apabila PDRB suatu daerah tinggi dapat disimpulkan bahwa makin tinggi pula tingkat perekonomian daerah tersebut.

2.1.2.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Septiarini dan Hernianingrum (2017). Dalam UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhannya. Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep

pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Fajri, 2021), berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu:

a. Kesehatan

Mils dan Gilson (1990) dalam Dimas (2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal yaitu alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan, jumlah sumber daya yang di gunakan dalam pelayanan kesehatan, pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan, efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya dan dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat. Angka harapan hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat

kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

b. Pendidikan

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus

meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

2.1.3 Kemiskinan

Ada banyak defenisi dan konsep mengenai kemiskinan. Bank dunia (2000) mengartikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan, yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan. Sementara itu, Kuncoro (2006) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut terdiri dari sandang,pangan, pendidikan, papan, dan kesehatan. Kemudian Kuncoro (2006) juga menyatakan bahwa kemiskinan itu setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu.
2. kedua, kemiskinan relatif, yaitu pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relative amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistika (dalam Maipita, dkk:2010) bahwa kemiskinan yaitu seseorang tergolong dala kategori miskin bila ia tidak mapu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs), dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemiskinan dalam suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Sharp (dalam Kuncoro:2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

- a) kemiskinan muncul karena tidak adanya kesamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- b) kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.
- c) kemiskinan muncul karena perbedaan akses dan modal.

Kemiskinan dalam suatu negara memiliki kategori yang sesuai dengan ketentuan yang dianut oleh negara tersebut. terdapat tiga Kategori kemiskinan menurut Maipita, dkk(2010) antara lain:

- a) kemiskinan struktural, kategori jenis ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan dan lainnya dan oleh karenanya kondisi sosial ekonom masyarakat menjadi rendah atau tidak mungkin sejahterah.
- b) kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau kerja keras, jadi etos bekerjanya sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.
- c) kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang dipandang dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum. Biasanya didasarkan pada sejumlah nutrisi. Kemiskinan absolut sering juga disebut dengan kemiskinan primer, bahkan disebut dengan kemiskinan ekstrim.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari pembangunan, yang mana kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang, yang merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia

sendiri, kemiskinan adalah masalah yang banyak dihadapi khususnya ketika pasca krisis ekonomi tahun 1998 (ERIKA, 2015).

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Mahendra, 2016).

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup dan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh sebagian besar negara sedang berkembang serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan adalah fenomena yang multidimensional,

demikian pula dengan penyebab kemiskinan. Tidak ada penyebab tunggal untuk menjelaskan kemiskinan, tetapi multi dimensi yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik.

Artinya, usaha untuk menurunkan jumlah penduduk miskin harus diterjemahkan, bukan hanya sebagai usaha untuk mengurangi jumlah penduduk yang miskin secara ekonomi, tetapi sekaligus juga mengurangi penduduk yang miskin secara sosial maupun politik. Indikator kemiskinan yang terkait dalam analisis kesejahteraan sosial meliputi jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan pendapatan per kapita (Hudaya, 2009). Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk

memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Banyak ukuran untuk menentukan angka kemiskinan, salah satunya ukuran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (Indonesia, 2016). Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak atau garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan absolut.

Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen yaitu (Kuncoro, 2013):

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain BPS, UNDP dalam laporan Human Development Report 1997 memperkenalkan ukuran kemiskinan dimana ukuran kemiskinan disebut dengan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index-HPI). Kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (three key deprivation), yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen di negara-negara kurang berkembang tidak

mungkin hidup lebih dari umur 40 tahun), pendidikan dasar (seperti diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan (Syafi'i, 2001).

Kemiskinan adalah dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pangan, sandang dan lain sebagainya. Miskin itu adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Menurut Kuncoro, 1997 (dalam Marito&Tri, 2020) Lingkaran kemiskinan adalah sebuah lingkaran atau sekelompok elemen terkait yang berinteraksi satu sama lain dalam beberapa cara, menciptakan situasi dimana suatu negara akan tetap miskin dan menghadapi tantangan besar untuk maju menuju pembangunan yang lebih tinggi (Saharuddin&Ferri, 2016).

Masyarakat miskin memiliki standar hidup yang lebih rendah, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan banyak warga yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata. Kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok makanan dan non makanan berdasarkan pengeluaran (BPS dalam Zuhdiyati, 2017).

Penduduk masuk dalam kategori miskin berdasarkan pada angka pengeluaran rata-rata per orang per bulan yang berada dibawah batas kemiskinan yang

ditetapkan oleh pemerintah. Garis Kemiskinan (GK) dihitung berdasarkan indikator nilai biaya atas kebutuhan asupan makanan (sebanding dengan 2100 kkal) dan non makanan (sandang, papan, kesehatan dan pendidikan). Kemiskinan yang terjadi di suatu daerah juga perlu diperhatikan karena dapat menjadi penyebab yang menghambat peningkatan pada kualitas sumber daya manusia.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang ditandai oleh berbagai permasalahan seperti kualitas hidup penduduk yang rendah, pendidikan, gizi anak, kesehatan yang juga rendah serta akses air minum bersih yang kurang (Abdoellah, 2016). Sehingga penduduk miskin sulit untuk mengakses sumber-sumber kebutuhan untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Disisi lain, menurut Adam Smith dalam (Jasasila, 2020) bahwa terdapat dua aspek utama yang menjadi inti dari proses pembangunan yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang mengalami pertumbuhan akan berdampak pada pasar yang semakin luas sehingga dalam perekonomian membentuk adanya spesialisasi yang meningkat. Proses dalam pembangunan akan semakin cepat dengan adanya spesialisasi dan pembagian kerja, maka produktivitas tenaga kerja semakin meningkat. Garis kemiskinan merupakan ukuran yang menyatakan besaran pengeluaran pemenuhan kebutuhan. Garis kemiskinan yang dipakai setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada yang berlaku umum atas satu garis kemiskinan, ini disebabkan karena terdapat perbedaan lokasi serta standar kebutuhan hidup. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Robert Chambers (2010) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan konsep terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) Kemiskinan (proper);
- 2) Ketidakberdayaan (powerless);
- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency);
- 4) Ketergantungan (dependence); dan
- 5) Keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Terdapat banyak penjelasan tentang penyebab kemiskinan, salah satunya yaitu ada keterbelakangan perekonomian di suatu wilayah. Penduduk negara tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, pengolahan produksi tradisional, dan sikap apatis terhadap lingkungan (Kuncoro, 2006).

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

- 1) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- 2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

]Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

- 3) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sulit di hadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga-keluarga miskin memiliki kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran, dan pendidikan rendah dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Anggota keluarga miskin memiliki kemungkinan lebih besar melakukan kejahatan dan menjadi korban kejahatan.

Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan disebabkan atas dua hal, yaitu :

- a) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.
- b) Kemiskinan muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktifitas dan pendapatan yang diperoleh.

Kuncoro (2000) apabila dilihat secara makro, kemiskinan muncul akibat ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Kuncoro (2000) berdasarkan penyebab terjadinya kemiskinan maka akan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious circle of poverty).

Ciri dari kelompok penduduk miskin adalah :

- a) Rerata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan.
- b) Tingkat pendidikan rendah.c. Mayoritas bekerja atau usaha sendiri yang bersifat usaha kecil (sektor informal),
- c) setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).
- d) Mayoritas berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area).
- e) Kurangnya kesempatan memperoleh (dalam jumlah yang cukup) bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan social lainnya (Suryawati : 2005).

Kelompok penduduk miskin di masyarakat pedesaan dan perkotaan umumnya digolongkan pada buruh tani, pedagang kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, pengemis, pengamen dan pengangguran. Menurut Paul Spicker (2002) penyebab kemiskinan dibagi atas empat :

- a) Individual Explanantion, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
- b) Familial Explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
- c) Subcultural Explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.

- d) Structural Explanation, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak.

Menurut Sharp et al. (2000), kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu:

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja. Penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja (SDM) yang dimiliki oleh suatu Negara, biasanya yang sering menjadi acuan tolakukur adalah dari pendidikan (buta huruf).Semakin tinggi angkatan kerja yang buta huruf semakin tinggi juga tingkat kemiskinan yang terjadi.
2. Akses terhadap kepemilikan modal yang sulit.Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kemiskinan.
3. Pengetahuan masyarakat terhadap penguasaan teknologi rendah. Di jaman era globalisasi saat ini seseorang dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Makin banyak orang yang tidak bisa menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan banyak pengangguran. Hal ini merupakan awal dari kemiskinan terjadi. Jumlah pengangguran yang besar menyebabkan potensi terjadi kemiskinan besar pula.
4. Sumber daya yang tidak digunakan dengan efisien. Penduduk yang tinggal dinegara berkembang terkadang jarang memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal. Contohnya, masyarakat desa untuk memasak

cenderung menggunakan kayu bakar dibanding menggunakan gas yang banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan.

5. Pertumbuhan penduduk tinggi. Teori Malthus, pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur sedangkan bahan pangan sesuai dengan deret hitung. Berdasarkan hal ini maka terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah penduduk dengan minimnya bahan pangan yang tersedia. Ini merupakan indikator penyebab terjadi kemiskinan.

2.1.4 Hubungan Antar Variabel X dengan Variabel Y

2.1.4.1. Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Kuznet (dikutip Tambunan, 2001) pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Wijayanto, 2010: 41).

Selanjutnya menurut penelitian Dio Syahrullah (2014:86) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil negatif antara PDRB dan kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi PDRB maka Tingkat kemiskinan semakin menurun.

Mekanisme hubungan PDRB dan Tingkat kemiskinan umumnya bersifat negatif dan signifikan, artinya peningkatan PDRB suatu daerah cenderung menurunkan Tingkat Kemiskinan. Peningkatan PDRB berpotensi mengurangi Kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan kerja dan Peningkatan pendapatan : dengan lebih banyak tersedia lapangan kerja, pengangguran akan berkurang, dan pendapatan Masyarakat akan meningkat. Peningkatan ini secara langsung

berkontribusi pada penurunan Tingkat kemiskinan. Akses Pendidikan dan Kesehatan: akses yang lebih baik ke Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja, sementara akses Kesehatan yang memadai akan mengurangi beban biaya Kesehatan dan meningkatkan produktivitas kerja. Hermanto siregar (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dari PDRB akan berkembangnya lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

2.1.4.2. Hubungan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut (Arifin,2022) IPM memiliki hubungan terhadap Tingkat kemiskinan, Dimana pada saat indeks Pembangunan manusia meningkat, maka Tingkat kemiskinan menurun. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat disuatu wilayah. Secara umum indeks Pembangunan manusia dan Tingkat kemiskinan memiliki hubungan negatif, artinya semakin tinggi IPM, maka semakin rendah Tingkat kemiskinan.

Mekanisme pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan :

1. Peningkatan kualitas hidup dan Sumber Daya Manusia:

IPM mencakup dimensi Pendidikan, Kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada ketiga aspek ini berarti Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap Pendidikan berkualitas, layanan Kesehatan yang memadai, dan pendapatan yang lebih tinggi.

2. Peningkatan produktivitas dan pendapatan :

Kualitas SDM yang direpresentasikan oleh IPM yang tinggi akan berdampak pada produktivitas kerja. Produktivitas yang tinggi akan menghasilkan

pendapatan yang lebih besar bagi Masyarakat, sehingga secara langsung mengurangi kemiskinan.

3. Akses terhadap peluang ekonomi: Negara atau wilayah dengan ipm yang tinggi cenderung memiliki Tingkat pengangguran yang rendah karena akses yang lebih baik terhadap Pendidikan, Kesehatan dan peluang ekonomi.

2.2. Penelitian sebelumnya

Al Muhariah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Determinasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal KLASSEN, Volume. 1 No. 2, Tahun 2021. Menggunakan alat analisis data panel. Berdasarkan hasil penelitian secara persial. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0.6554834. hal ini berarti bahwa 65.54% persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah penduduk. dan IPM. Sedangkan sisanya 34.46% dijelaskan oleh variabel lain di luar .penelitian ini. Dan dapat disimpulkan Secara bersama-sama variabel PDRB, jumlah penduduk, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2020. Variabel PDRB memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2020.

Pongsirante (2023) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengaruh PDRB, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Kab. Toraja Utara.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, volume. 23 nomer. 7. Tahun 2023. Menggunakan alat

analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian di dapat nilai Adjusted R Square sebesar 0.955479. Hal ini menunjukkan bahwa persentase dari Tingkat kemiskinan sebesar 95.54%. Sedangkan sisanya sebesar 4.46% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi. Dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu Secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kab. Toraja Utara. Sedangkan IPM berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kab. Toraja Utara. Secara simultan variabel PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kab. Toraja Utara. Persentase sumbangan pengaruh jumlah penduduk dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 97.70%. Sedangkan sisanya 2.3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.

Herlambang (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa timur.” Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.27, No.1. Tahun 2023. Menggunakan alat analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa timur, dapat ditarik kesimpulan variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Jawa timur tahun 2017-2020 dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$, yaitu $-2.110457 > -1.97601$ pada taraf signifikansi sebesar 0.05. Variabel IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2020 dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $-10.07591 > -1.97601$ pada taraf signifikansi sebesar 0.05. Variabel PDRB dan IPM secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Jawa

Timur tahun 2017-2020 dengan F hitung sebesar $76.82910 > F$ tabel sebesar 2.67 pada taraf signifikansi sebesar 0.05.

Mandey (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB, Rata-rata lama sekolah, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Talaud.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.23, No.1. Tahun 2023. Menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa PDRB, Rata-rata lama sekolah, dan IPM di Kabupaten Talaud berpengaruh signifikan Terhadap Kemiskinan . Namun secara parsial, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Talaud, rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Talaud dan IPM berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Talaud . Oleh karena itu, Pemerintah harus memperhatikan ketiga variabel ini secara bersama-sama dan melakukan evaluasi secara berkala agar bisa terus ditingkatkan kearah yang lebih baik.

Dewi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh IPM dan PDRB Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.” Jurnal Bisnis Net, Vol.3, No.2.Tahun 2020. Menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yakni indeks pembangunan manusia (IPM), laju pertumbuhan PDRB, dan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Janah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, IPM dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.1, No.4. Tahun 2022. Menggunakan alat analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian variabel PDRB, IPM dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. PDRB Perkapita memiliki pengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2019-2021, IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2019-2021 dan Penanaman Modal Asing memiliki Pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2019-2021

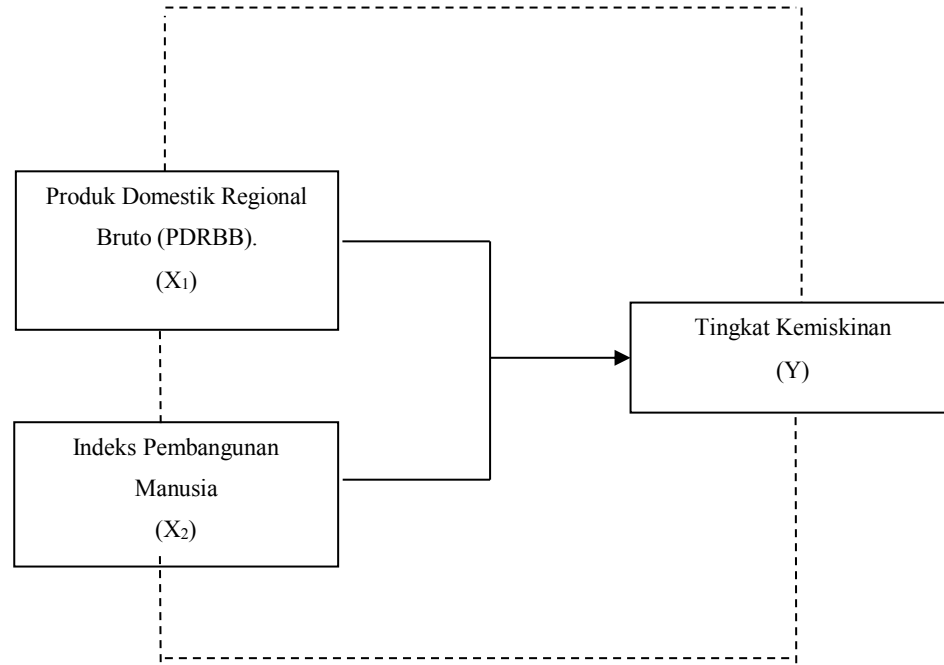
Primandari,dkk (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia” *Jurnal Ekonomi*, Vol.10, No.2. Tahun 2022. Menggunakan alat analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia dalam Tahun 2017-2020. Variabel Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara dalam Tahun 2017-2020. Secara bersama-sama kedua variabel bebas dalam penelitian ini (Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia dalam Tahun 2017-2020.

Akaseh(2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolongo.” *Jurnal Al-Buhuts*, Vol.17, No. 2. Tahun 2021. Menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan,

maka dapat di simpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten Bone Bolango dan jika dilihat uji determininasi pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan sangat kecil, hanya 0,7%. Sehingga ini perlu untuk digenjut ke depan, agar pengaruhnya bisa bergerak positif sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Aulia (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.” Jurnal Ecogen, Vol.5, No.4. Tahun 2022. Menggunakan alat analisis regresi berganda data panel. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu Seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima ditunjukkan dengan hasil bahwa PDRB, kemiskinan, dan jumlah penduduk masing-masing berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021. Dengan arah pengaruhnya yaitu apabila PDRB mengalami kenaikan maka kenaikan tersebut juga dialami oleh IPM (positif), turunnya kemiskinan berdampak pada kenaikan IPM (negatif), dan apabila apabila jumlah penduduk mengalami kenaikan maka IPM juga mengalami kenaikan (positif). Selain itu, besarnya kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat di model yang ada dalam penelitian ini sebesar 0.985202 atau sebesar 98.5202% yang ditunjukkan oleh nilai R-Squared sedangkan yang menjelaskan sisanya ialah variabel lain diluar model.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

—————→ : Parsial

-----→ : Simultan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan dari permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan.